

Perubahan Politik dan Sosial Budaya Masyarakat Gampong Aceh Di Era Internet–New Media

Umaimah Wahid*

*Universitas Budi Luhur, Jakarta

ARTICLE INFO

Keywords:

Socio-political charge,
Local wisdom of acehness-gampong,
Internet-new media

email:

umaimah.wahid@budiluhur.ac.id

Jurnal Communicate

Volume 1 Nomor 1

Juli-Desember 2015

ISSN. 2477-1376

hh. 13–24

ABSTRACT

The Acehnese political communication starts from Gampong and embraces all individual inclusively. The political processes and the Gampong governance (village) in Aceh are held in meunasah which is a learning and community center of the Acehnese society. The research utilizes a constructivism paradigm that is to try to understand, explain and interpret meanings and ongoing social interactions. The governance of the Acehnese society is the first-level governance proven effective in advancing the Acehnese society. The political communicators like kechiek, imeum and tuhapeut govern based on fixed job descriptions without overlapping and violating each other. Internet technology as new media having character provides a new thing for the processing, transmission, reception and response as well as the interactive nature between users of new media audiences and it gives implication in media management change paradigm and the effect of community/audience. The system and structure is a form of the local treasure in which the Acehnese society is developed. Internet causing political and social change in the culture of the gampong.

Komunikasi politik Aceh dimulai dari Gampong dan merangkul semua individu inklusif. Proses politik dan pemerintahan Gampong (Desa) di Aceh yang diadakan di meunasah yang merupakan pusat pembelajaran dan komunitas masyarakat Aceh. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yang mencoba untuk memahami, menjelaskan dan menafsirkan makna dan interaksi sosial yang sedang berlangsung. Pemerintahan masyarakat Aceh adalah pemerintahan tingkat pertama terbukti efektif dalam memajukan masyarakat Aceh. Komunikator politik seperti kechiek, imeum dan tuhapeut memerintah dengan berdasarkan deskripsi pekerjaan tetap tanpa tumpang tindih dan melanggar satu sama lain. Teknologi internet sebagai media baru yang bersifat memberikan hal baru untuk pengolahan, transmisi, penerimaan dan respon serta sifat interaktif antara pengguna dari khalayak media baru dan memberikan implikasi paradigma perubahan manajemen media dan pengaruh masyarakat/audiens. Sistem dan struktur merupakan bentuk harta lokal di mana masyarakat Aceh dikembangkan. Internet menyebabkan perubahan politik dan sosial dalam budaya gampong tersebut.

©2015 JC. All rights reserved.

Pendahuluan

Perkembangan masyarakat Aceh pasca Tsunami menempatkan masyarakat Aceh semakin dinamis disebabkan pengaruh dari luar Aceh. Dalam proses rekonstruksi terdapat usaha yang konsisten oleh pemerintahan Aceh dan masyarakat untuk memelihara nilai-nilai sosial budaya Aceh. Namun nampaknya perubahan masyarakat tidak dapat terelakkan baik perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Salah satu penyebab perubahan yang paling kuat pengaruhnya di tengah masyarakat dikarenakan internet dan *new media*. Hal tersebut berakibat pada kompleksitas persoalan di tengah masyarakat yang memerlukan upaya secara khusus menjaga dan mempertahankan warisan tradisi Aceh dari gempuran kepentingan dan nilai-nilai global.

Upaya pemeliharaan nilai-nilai ke-Acehan selama ini dimulai dari pemerintahan Gampong sebagai level pertama dalam sistem pemerintahan Aceh. Gampong yang dikepalai oleh seorang *keuchik* dan dibantu urusan agamanya oleh *imeum meunasah* tidak mungkin dapat dilepaskan dalam proses konstruksi masyarakat Aceh. Artinya semua orang Aceh yang lahir dan tumbuh di Aceh merupakan anggota masyarakat sebuah Gampong. Selain *Keuchiek* dan *Imuem Meunasah* dalam pemerintahan Gampong juga mempunyai perangkat-perangkat Gampong lainnya yang disebut *tuha puet* yang membantu melayani kepentingan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Struktur politik, sosial dan budaya yang terdapat dalam sebuah Gampong diatur dalam ketentuan *Qanun Aceh*, diperkuat dengan adat istiadat dan nilai-nilai agama Islam. Semua proses politik tersebut melahirkan *reusam* (aturan) dalam sebuah Gampong yang hal itu semua (*reusam*) harus dijalankan oleh semua masyarakat Gampong dengan dikepalai oleh *keuchik* dan dibantu sepenuhnya oleh *imeum* dan *tuha puet*. Kinerja perangkat desa inilah yang menentukan kesuksesan sebuah Gampong. Atas dasar pemikiran tersebut, maka Gampong mempunyai peran strategis dalam pengembangan masyarakat di Aceh.

Semua perangkat yang terdapat dalam Gampong memerlukan proses komunikasi politik yang tepat dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka. Proses komunikasi politik tersebut menjadi sangat penting karena yang mengatur dan menentukan arus informasi dan komunikasi dalam proses interaksi sosial budaya bahkan agama. Interaksi perangkat Gampong menjadi proses komunikasi politik di antara aparat Gampong dengan aparat Gampong,

aparat Gampong dengan masyarakat, serta Gampong dengan Gampong, dan Gampong dengan level pemerintahan yang lebih tinggi.

Dalam pemerintahan sehari-hari, pemerintah Gampong menggunakan kekuatan sosial budaya masyarakat Aceh yang sudah mengakar dan terbukti berhasil membangun masyarakat Aceh dari masa ke masa. Oleh karenanya sistem dan struktur pemerintahan Gampong merupakan kekuatan lokal Aceh yang harus dijaga dan dipelihara serta dipertahankan sebagai sistem dan struktur pemerintahan Gampong pada level pertama konstruksi masyarakat Aceh. Proses politik ini didukung sepenuhnya oleh adat istiadat dan nilai-nilai agama; salah satunya adalah *meunasah*. *Meunasah* yang ada di setiap Gampong, Aceh merupakan *learning center* dan *community center*, yaitu wadah, muara dan pusat pengembangan masyarakat Gampong. Artinya dalam membangun masyarakat Aceh *meunasah* adalah kekuatan integral di dalam proses tersebut.

Pemerintahan Gampong juga dihadapkan oleh adanya program baru dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) yaitu Program Desa Pintar 2009. Program desa pintar bertujuan untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika Pusat (Kominfo) membangun desa fasilitas internet (desa pintar). Program ini dilaksanakan setelah sebelumnya membuat program desa berdering (Gampong Kring). Fasilitas desa pintar akan ditempatkan di desa kecamatan, sehingga masyarakat mudah mengakses informasi. Adapun tujuan program ini agar masyarakat desa memperoleh akses informasi yang mudah dan murah sehingga membantu proses pengembangan masyarakat desa ke arah yang lebih baik. Fasilitas internet selain dapat dipergunakan untuk pengembangan jaringan telepon melalui internet, sekaligus berguna bagi pengembangan ekonomi dan sosial budaya.

Penelitian ini memfokuskan pada aktivitas politik pemerintahan Gampong dalam mengelola masyarakat dengan segala persoalan dan dinamika yang terjadi. Aktivitas pemerintahan di tengah masyarakat selalu menggunakan nilai-nilai agama Islam dan sosial budaya Aceh. Proses komunikasi politik yang berlangsung menjadi menarik karena berkaitan dengan nilai-nilai kearifan lokal Aceh yang dikembangkan selama pemerintahan Kerajaan Aceh dan telah terbukti selama ratusan tahun mampu mengkonstruksi kekuatan dan kemandirian masyarakat Aceh. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa telah terjadi perubahan yang signifikan di tengah masyarakat Aceh Gampong disebabkan perkembangan

internet dan *new media*. Perkembangan tersebut sebagai bentuk dinamika komunikasi massa dengan menggunakan kekuatan media massa untuk memicu dan mendorong isu publik melalui pilihan dan bentuk sajian atau pesan (Habermas, 2006). Pesan yang disampaikan kepada khalayak dengan menggunakan komunikasi massa ini dapat dikatakan sebagai agenda *setting* sehingga masyarakat akan mengalami perubahan sesuai dengan efek yang diinginkan media.

Pada dasarnya masyarakat pasti akan mengalami perubahan yang diakibatkan dari proses interaksi yang dinamis dan terus menerus dalam sebuah masyarakat. Salah satu penyebab perubahan adalah datangnya hal-hal baru seperti internet dan *new media*. Masyarakat melakukan adaptasi dengan teknologi baru tersebut sehingga proses sosial budaya dan politik tidak mampu menghindari perubahan. Perubahan sosial menunjukkan adanya perubahan pada struktur sosial dari suatu masyarakat dimana pola hubungan sosial yang lama digantikan oleh pola hubungan sosial yang baru di dalam suatu masyarakat.

Bagaimana dengan masyarakat Gampong Aceh, apakah juga mengalami perubahan karena internet dan sosial media sebagai bagian dari kooptasi perkembangan teknologi komunikasi yang mendominasi arus sistem informasi saat ini, atau masyarakat Aceh Gampong tetap bertahan dengan sistem dan struktur politik yang selama ini berlangsung?

Peneliti tertarik meneliti permasalahan tersebut dengan menggunakan metode Etnografi yaitu sebuah metode yang dipergunakan untuk memahami dan menjelaskan realitas sosial masyarakat secara menyeluruh sesuai dengan kekuatan budaya mereka. Dalam proses interaksi, mencoba melihat variasi dan bentuk narasi, struktur bahasa, pakaian, dan artifak masyarakat Gampong. Penelitian sekaligus menemukan, menjelaskan keterkaitan perubahan sosial. Budaya dan politik didasarkan program desa pintar (Kominfo). Bagaimana jaringan internet dan *new media* mengubah proses komunikasi politik yang selama ini berbasis nilai-nilai sosial budaya Aceh, perubahan apa saja yang terjadi, apakah mengubah karakteristik, nilai-nilai sosial budaya, dan politik masyarakat Aceh.

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses perubahan nilai-nilai sosial budaya dan politik dalam masyarakat Aceh kearifan lokal Aceh karena masuknya internet dan *new media/social media* dalam proses pengembangan masyarakat

pada era internet? Penelitian yang menggunakan landasan kerangka pemikiran konstruktivisme, teori dan konsep komunikasi politik, teori perubahan sosial, nilai sosial budaya Aceh, dan pemerintahan Gampong diharapkan dapat menghasilkan temuan yang mampu menjawab permasalahan penelitian dan sekaligus menemukan pengembangan keilmuan dalam bidang komunikasi politik berdasarkan kearifan lokal di era internet – *new media* yang menyebabkan perubahan sosial di tengah masyarakat lokal (Gampong, Aceh) dimana berimplikasi pada perubahan sosial, budaya dan politik. Penelitian menggunakan metode Etnografi komunikasi yang bertujuan mengetahui, memahami menjelaskan, dan menginterpretasi kearifan lokal komunikasi politik Aceh, diharapkan mampu memberikan kontribusi yang mencerahkan bagi pengembangan komunikasi politik dengan karakter atau basis nilai-nilai sosial budaya dan politik masyarakat Aceh.

Komunikasi politik (*political communication*) adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintah, dan kebijakan pemerintah. Wahid, (2012) Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara “yang memerintah” dengan “yang diperintah”. Menurut Graber (2005) sebagian besar studi komunikasi politik diambil dari bidang psikologi, ilmu politik, dan komunikasi. Campuran tersebut tidak mengherankan mengingat untuk menanggapi pesan-pesan politik dapat menggunakan komunikasi politik melalui kajian substansi politik dan perilaku manusia. Pesan-pesan politik dalam komunikasi politik menggambarkan teori yang dipilih secara selektif dari teori psikologi, politik, serta teori populer yang diambil dari komunikasi. Senada dengan pendapat Bennett & Iyengar (2008) yang mengatakan bahwa komunikasi politik merupakan ilmu politik, sosiologi, psikologi dan ekonomi untuk membantu dalam mengkaji peran komunikasi dalam membentuk perilaku. Begitu juga halnya Christen & Gunther (2003) mengatakan bahwa sebagian besar teori-teori komunikasi politik relevan dengan fenomena tingkat individu, seperti pengolahan informasi secara umum, atau fitur khusus seperti berbagai aspek pembentukan opini dan persuasi.

Sedangkan menurut Rush & Althoff (Wahid, 2012) menyatakan bahwa komunikasi politik sebagai proses di mana informasi politik yang relevan diteruskan dari suatu bagian sistem politik kepada bagian sistem politik lainnya. Sistem politik yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah sistem politik yang terdapat dalam pemerintahan Gampong. Gampong

sebagai sebuah sistem politik juga mempunyai perangkat-perangkat sistem, nilai, dan aktivitas-aktivitas yang mendukung sistem politik, sekaligus terdapat aktor-aktor politik yaitu *Kechiek*, *Teungku Imuen*, dan *Tuha Peut*. Proses komunikasi politik berlangsung dalam interaksi antara semua anggota sistem dan struktur politik yang ada. Dalam proses komunikasi muncul beragam bentuk pesan politik, simbol-simbol politik serta pemahaman makna terhadap pesan politik.

Para aktor politik, yang dalam level Gampong Aceh terdiri dari *Kechiek*, *Imuen*, dan *Tuhapeut* menggunakan proses komunikasi langsung. Komunikasi langsung yang berbentuk *face to face* komunikasi inilah yang menjadi kunci utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong. Dengan proses komunikasi langsung yang berbentuk *face to face communication* para perangkat Gampong sebagai komunikator politik menyampaikan pesan-pesan politik untuk mensosialisasikan dan mengkampanyekan aktor politik dan program politik, konsep, dan isu politik dalam pemerintahan Gampong. Beragam media tradisional dipergunakan mensosialisasikan, menginformasikan, dan membangun hubungan sebuah Gampong. Namun bagaimanapun dalam perkembangan sekarang ini proses politik tingkat Gampong juga tidak ketinggalan terimbas dengan internet (*new media* dan *social media*).

Berkomunikasi berarti melakukan transformasi informasi untuk memperoleh respon, koordinasi makna antara orang-orang, dan khalayak; saling berbagi informasi, ide atau tingkah laku/sikap berbagai elemen-elemen perilaku atau gaya hidup melalui serangkaian aturan yang ada/ditetapkan, yaitu pertemuan pikiran mengenai kesamaan simbol-simbol dalam pikiran partisipan untuk memahami. Proses tersebut yang kemudian membawa pengalaman individu secara internal berbagi dengan orang lain atau mentransformasikan informasi dari satu orang/grup kepada pihak lain. (Nimmo, 2004). Fungsi dari komunikasi politik adalah struktur politik yang menyerap berbagai aspirasi, pandangan, dan gagasan yang berkembang dalam masyarakat dan menyalurkankannya sebagai bahan dalam penentuan kebijakan. Dengan demikian fungsi membawakan arus informasi balik dari masyarakat ke pemerintah dan dari pemerintah ke masyarakat.

Menurut Nimmo (2004), komunikasi dapat terjadi dari satu sumber yang ditujukan kepada orang banyak. Komunikasi ini dikenal sebagai komunikasi massa yang dapat dilakukan dengan menggunakan dua bentuk saluran; saluran tatap muka dan saluran

media massa. Keduanya merupakan strategi dalam membentuk opini publik agar tujuan politik tercapai. Strategi dalam komunikasi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional pada saat ini tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan politik di masa depan (Anwar, 2003).

Sistem Politik-Pemerintahan Gampong sebagai Kearifan Lokal

Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia mempunyai keistimewaan dan keluasan untuk menjalankan sistem pemerintahan pada tingkat Gampong. Ketentuan tersebut berdasarkan Qanun Aceh, Nomor 5 Tahun 2003 dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 5 Tahun 2006. Dalam wilayah Kabupaten/Kota dibentuk mukim yang terdiri atas beberapa Gampong. (Kurniawan, 2012). Pemerintahan Gampong terdiri atas *Keuchik* dan Badan Permusyawaratan Gampong yang disebut *Tuha Peuet* atau nama lain. Gampong dipimpin oleh *Keuchik* yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat yang tata cara pemilihannya diatur dengan Qanun Aceh.

Berdasarkan Qanun Aceh, Nomor 5 Tahun 2003 dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 5 Tahun 2006 bahwa desa dalam provinsi Aceh disebut Gampong dan pemerintahan desa disebut pemerintahan Gampong (Kurniawan, 2012). Dalam pemerintahan desa/Gampong pelaksanaan tugas dalam pemerintahan dilaksanakan oleh *Kechiek*, *Imuem Meunasah* dan dibantu oleh perangkat-perangkat desa untuk melaksanakan pemerintahan Gampong.

Pemerintahan Gampong merupakan elit politik Gampong yang menjalankan fungsi pemerintahan untuk melayani masyarakat Gampong dengan semua persoalan yang mereka hadapi. Pemerintahan Gampong ini menjalankan tugas mereka secara seimbang dengan peran mereka masing-masing menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong secara terbuka dan saling berkerjasama. *Kechiek* dalam pemerintahan Gampong bertugas melayani kepentingan dan kebutuhan masyarakat berkaitan dengan hal-hal yang bersifat umum. Sedangkan *Imuemmeunasah* berfungsi sebagai penjaga gawang masalah-masalah keagamaan di tengah masyarakat. Namun, perbedaan tugas keduanya tidak berarti memisahkan secara mutlak posisi mereka.

Peran *Kechiek* sebagai kepala Gampong dan didukung oleh *Imuem Meunasah* dalam pelaksanaan pemerintahan, sosial politik, kehidupan keagamaan dan pembentukan moral. Keseimbangan inilah yang senantiasa diupayakan dalam proses konstruksi

masyarakat Aceh. Dalam pelaksanaan pelayanan dan pengembangan masyarakat, *Kechiek* dan *Imuem* dibantu oleh perangkat desa dan *tuha peut*. Aturan-aturan (*reusam*) Gampong menjadi landasan dalam proses pelaksanaan pemerintahan Gampong, Lembaga Adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat sebagaimana diatur dengan Qanun Aceh. Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan ditempuh dengan mengedepankan nilai reusan Aceh (adat istiadat budaya Aceh) melalui Lembaga Adat.

Sistem politik Gampong Aceh yang berdasarkan adat istiadat merupakan kekayaan atau kearifan lokal Aceh yang telah dipergunakan semenjak kerajaan Aceh. Kearifan lokal (*local wisdom*) dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Ciri-cirinya adalah (1) Mampu bertahan terhadap budaya luar, (2) Memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, (3) Mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, (4) Mempunyai kemampuan mengendalikan, dan (5) Mampu memberi arah pada perkembangan budaya.

Kearifan lokal dimiliki oleh setiap daerah di Indonesia termasuk Aceh. Salah satu kearifan masyarakat Aceh adalah sistem pemerintahan desa yang dalam bahasa Aceh disebut Gampong. Gampong yang dalam sistem pemerintahan Aceh berada pada level pertama adalah bentuk konkrit dari kearifan lokal sistem pemerintahan Gampong sudah ada semenjak masa kejayaan pemerintahan Kerajaan Aceh tetap dipertahankan hingga kini. Upaya mempertahankan sistem politik Aceh tersebut dimaktumkan dalam Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 32 tahun 2002, yang mempunyai semangat memberi ruang kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Internet dan New Media

Internet (kependekan dari *interconnection-networking*) secara harfiah ialah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar *internet protocol suite* (TCP/IP) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Rangkaian internet yang terbesar dinamakan Internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan

kaidah ini dinamakan *internet working*. Internet merupakan jaringan komputer terkoneksi secara global yang berkomunikasi secara bebas serta berbagi dan bertukar informasi (Baran, 2012).

Media internet telah menjelma menjadi media masa baru seiring dengan penyebaran pesan dengan *integrated delivery system* yaitu media cetak, audio dan video serta media interaktif termasuk *video games*. Internet juga mampu menyediakan akses kepada khalayak dalam jumlah besar, dalam bentuk jaringan pembelanjaan/bisnis dan sosial media, sekaligus penjualan produk dengan menggunakan iklan dan promosi. Internet kemudian menciptakan media baru dan sosial media. Dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan kemajuan teknologi, banyak bermunculan media baru yang dapat menjadikan ikatan sosial menjadi renggang (Rahn & Rudolph, 2001). Apabila ikatan sosial renggang, maka dapat melemahkan toleransi sebagai norma-norma demokrasi dan menyulitkan dalam menyepakati agenda politik (Dahlgren, 2001; Entman dan Herbst, 2001; Sparks, 2001; Sunstein 2001). Media baru adalah segala perangkat teknologi komunikasi yang berbagi ciri yang sama dan memungkinkan dengan digitalisasi dan ketersediannya yang luas untuk penggunaan pribadi sebagai alat komunikasi. (McQuail, 2010).

Teknologi internet menyediakan hal baru bagi pemrosesan, pengiriman, penerimaan, dan respon serta sifat interaktif antara khalayak pengguna *new media*. Livingstone (1999) menyatakan bahwa “apa yang baru mengenai internet barangkali adalah kombinasi dari interaktivitas dengan ciri yang inovatif bagi komunikasi massa-jenis konten tidak terbatas, jangkauan khalayak, sifat global dari komunikasi.

Media baru mempunyai sifat yang interaktivitas yang memberi implikasi dalam perubahan paradigma pengelolaan media dan efek di masyarakat/khalayaknya. Sifat inilah yang menyebabkan media baru sangat diminati dan menimbulkan efek yang sangat kuat di tengah masyarakat yang kemudian memberikan berimplikasi secara kuat bagi perubahan sosial, budaya, ekonomi, keagamaan dan politik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Delli Carpi (2000), dan Shah, *et al.*, (2001) yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, beberapa ilmuwan menggantungkan harapan mereka pada internet (Graber, 2005). Sedangkan Mosco dan Foster (2001) melihat teknologi ini sebagai alat baru yang hanya digunakan oleh para elit penguasa untuk mempertahankan kekuasaan mereka (Graber, 2005). Oleh karena itu, media baru ini memiliki efek yang cukup besar kepada khalayak

melalui interaksi pesan-pesan antara komunikator dengan komunikan. Downes dan McMillian (McQuail, 2010) menyebutkan lima dimensi interaktivitas media baru yaitu (1) Arah komunikasi, (2) Fleksibilitas waktu dan peran yang dipertukarkan, (3) Memiliki kesadaran akan ruang dalam lingkungan, (4) Tingkat Pengendalian (pada lingkungan komunikasi dan (5) Tujuan yang diamati (pertukaran dan persuasi yang terarah).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Guba dan Lincoln (1994) menjelaskan bahwa pendekatan paradigma konstruktivisme mengandung implikasi metodologis yaitu *dialogic* dan *dialectical*. Dialog tersebut haruslah bersifat dialektikal secara alamiah untuk mentransformasikan penolakan dan salah pengertian sehingga mengarah kepada lebih banyak kesadaran yang terbentuk, sebagai upaya melihat bagaimana struktur dapat mengubah dan memahami tindakan yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan yang terjadi. Sedangkan Stanley (2013) memahami epistemologi konstruksi sosial dalam penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman subjektif tentang sudut pandang dan kompleksitas fenomena sosial. Selanjutnya, Stanley (2013) menambahkan bahwa penelitian kualitatif memiliki kehati-hatian dalam mengklaim dan merekomendasikan hasil penelitian. Artinya studi kualitatif hanya menyoroiti fenomena yang kompleks secara mendalam untuk dapat melihat akar masalah.

Pendekatan kualitatif dengan metode Etnografi menjadi pilihan peneliti sebagai implikasi dari paradigma konstruktivisme. Penelitian etnografi merupakan penelitian lapangan dengan metode pengamatan berperan-serta. Tujuannya adalah untuk menelaah sebanyak mungkin proses sosial dan perilaku dalam budaya tersebut, yakni dengan menguraikan seting alamiahnya dan menghasilkan gagasan teoritis yang akan menjelaskan apa yang dilihat dan didengar (Guba & Lincoln, 2008).

Penelitian ini menggunakan *field research*. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode *field research* disebabkan penelitian ini mengharuskan peneliti terlibat langsung dengan subyek penelitian. *Field research* lebih mengutamakan interaksi tatap muka dengan komunitas masyarakat dalam lingkungan yang natural. *Field research* adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar. *Field research* dipergunakan manakala subyek penelitian masih membuka ke-

mungkinan eksplorasi yang seluas-luasnya. Penelitian ini melakukan permasalahan dalam seting yang teramati (Groat & Wang, 2002). Teknik pengumpulan data dalam penelitian etnografi adalah wawancara, observasi, analisis dokumen dan *focus group discussion* (Stanley, 2013).

Metode *field research* dipilih oleh peneliti disebabkan penelitian ini mengharuskan penelitian terlibat langsung dengan subyek penelitian. *Field research* lebih mengutamakan interaksi tatap muka dengan komunitas masyarakat dalam lingkungan yang natural. *Field research* adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar. *Field research* dipergunakan manakala subyek penelitian masih membuka kemungkinan eksplorasi yang seluas-luasnya, topik penelitian merupakan suatu hal baru yang jarang atau tidak pernah dibahas selanjutnya, hingga gambaran seutuhnya hanya dapat diperoleh dengan pendekatan pada *real groups* untuk mencapai naturalness. Penelitian ini melakukan permasalahan dalam seting yang teramati (Groat & Wang, 2002).

Berdasarkan keterangan tersebut, Groat & Wang (2002) menyatakan terdapat empat komponen kunci berkaitan dengan metode penelitian *field research* sebagai bagian dari penelitian kualitatif, yaitu; (1) Penekanan pada seting awal, seting natural berarti subyek penelitian tidak berpindah dari tempat adli kejadian, Peneliti menerapkan berbagai strategi untuk menempatkan diri dalam konteks penelitiannya. Konteks tidak perlu berubah demi pelaksanaan penelitian; (2) Fokus pada interpretasi dan makna, Peneliti tidak hanya mendasari penelitiannya pada realitas empiris dari observasi dan wawancara yang dilakukannya, namun memainkan peran penting dalam menginterpretasikan dan memaknai data, yakni: (1) Fokus pada cara responden memaknai keadaan dirinya, tujuan dari peneliti adalah mempresentasikan gambaran menyeluruh dari seting atau fenomena studi, sesuai dengan pemahaman dari responden sendiri, dan (2) Penggunaan beragam taktik, sebagai bagian dari pengamatan realitas yang cenderung cair, *field research* tidak memiliki kecenderungan untuk hanya mengandalkan taktik tunggal, melainkan beragam sebagai panduan berbagai taktik sesuai keadaan lapangan.

Metode analisis data peneliti menggunakan *multiple analysis* karena penelitian ini melibatkan lebih dari dua unit analisis, yaitu: (1) *Keuchiek* dan *imuem meunasah* atau *tuha peut* di Gampong pada Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, (2) Sistem Komu-

nikasi Politik Gampong, Gampong sebagai pemerintahan terkecil dalam struktur pemerintahan masyarakat Aceh, (3) Tokoh masyarakat Aceh baik tingkat Gampong, mukim, Kecamatan dan Kabupaten (4) Tokoh Majelis Adat Aceh (MAA) dan Lembaga-lembaga Adat Aceh yang terdapat dalam pemerintahan Gampong, (5) Masyarakat, anggota Gampong Aceh berkaitan perubahan sosial politik, dan (6) Pengelola Program Desa Pintar tingkat Gampong dan di atasnya yang diperlukan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada saat ini, adalah bagian yang tidak mungkin dipisahkan dalam kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indonesia pada level Negara dan Aceh pada level daerah. Internet menciptakan sebuah dunia baru yang mengubah banyak realitas masyarakat baik dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, politik bahkan keagamaan. Internet menjadi kekuatan dalam perubahan masyarakat di berbagai belahan dunia, sekaligus Internet memperkuat pemberdayaan masyarakat desa.

Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berkembang ke arah yang lebih baik dengan peluang yang besar untuk meningkatkan kualitas hidup personal, kelompok, masyarakat, dan negara. Masyarakat desa yang selama ini sulit terjangkau dengan jaringan internet dan telpon terutama bagi masyarakat desa terluar dan terbatas Indonesia. Masyarakat desa yang tertinggal jauh dari pembangunan dan pengembangan masyarakat terutama disebabkan oleh pembangunan jaringan internet yang tidak ada atau belum memadai. Sehingga membuat desa dan masyarakatnya tertinggal dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satu program Kominfo yaitu “desa pintar” dilaksanakan sebagai upaya untuk membuka akses masyarakat terhadap informasi, sehingga diharapkan desa-desa di Aceh melek internet dan mampu mengubah masyarakat desa mampu mengakses informasi secara cepat dan mudah.

Program Desa pintar yang dimulai semenjak 2009 sementara dijalankan pada 220 kecamatan di Aceh, 260 kecamatan di Jawa Timur, Sumatera Selatan 157 kecamatan, Daerah Istimewa Yogyakarta 13 kecamatan, Bali 40 Kecamatan dan yang paling banyak mendapatkan fasilitas ini adalah Kepulauan Riau dari program 5.400 desa pintar mulai dari tahun 2000 sampai dengan 2014. Tujuan program ‘desa pintar’ adalah penguatan daerah kecamatan dan desa yang masih terhambat dengan akses teknologi komunikasi, termasuk telepon.

Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi sasaran program desa pintar seperti di Pidie, Aceh Besar, Aceh Barat, Singkel dan kabupaten lainnya di Aceh. Program ini membuka akses telekomunikasi di desa-desa di Aceh dengan tujuan agar akses informasi dapat menciptakan peluang baru dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di Aceh. Program desa pintar di Propinsi Aceh diletakkan di Gampong-Gampong Aceh sebagai upaya untuk menciptakan akses terhadap informasi, sehingga Gampong-Gampong Aceh tidak menjadi daerah tertutup, terisolir dan terbelakang dibanding Gampong-Gampong yang sudah terjangkau akses internet dan telekomunikasi lainnya seperti jaringan telepon.

Dalam proses pelaksanaan program ini, elit politik memegang peranan penting karena mereka merupakan aparatur pemerintahan dan tokoh masyarakat Gampong. *Kechiek*, *Imuem* dan *Tuha Peut* adalah perangkat Gampong Aceh yang menentukan apakah program internet masuk desa atau desa masuk internet ini dapat diterima dan dilaksanakan atau tidak di sebuah Gampong. Artinya tidak tertutup kemungkinan ada semacam resistensi terhadap fasilitas telekomunikasi dan informatika di kalangan elite desa, karena fasilitas dimaksud akan membuka isolasi desa dari dunia luar dan hal itu dianggap merugikan kepentingan elite desa.

Dalam proses Internet masuk gampong yang menentukan adalah aparat atau elit politik Gampong untuk mendukung program yang bermanfaat bagi semua masyarakat Gampong, laki-laki dan perempuan. Dengan program desa pintar ini diharapkan banyak akses yang terbuka sehingga peluang-peluang bisnis dan hubungan baru dapat dibangun dengan lebih mudah, cepat dan murah. Dalam kehidupan sehari-hari di Gampong orang gemar bermusyawarah (*mufakat*) yaitu pertukaran pikiran untuk mencapai kebulatan pendapat dalam mendukung serta melaksanakan sesuatu urusan. Artinya segala sesuatu mengenai kepentingan umum di Gampong senantiasa diurus bersama antara *Keuchik* dan *Teungku Meunasah*, itu sebagai pelambang antara adat dengan hukum dapat berjalan secara seimbang.

Dalam musyawarah Gampong selalu utamakan kepentingan masyarakat berdasarkan tradisi kumulatif; kehidupan keagamaan orang Aceh dapat dilihat bahwa agama merupakan salah satu kekuatan sosial. Semua proses sosial dan politik pelaksanaannya tergantung pada kesepakatan *keuchik* dan *teungku meunasah*, serta perangkat adat lainnya bersatu kata

dalam perbuatan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Hal ini merupakan kekayaan budaya lokal Aceh yang telah turun temurun diwariskan dan diimplementasikan dalam kehidupan sistem pemerintahan/politik dan sosial budaya Aceh.

Dalam proses pelaksanaan desa pintar, maka meunasah sebagai *learning/education center*, *community center* dan *government center* menjadi wadah utama dalam menyukseskan kegiatan tersebut. *Meunasah* sebagai *learning/education center* maka setiap proses sosialisasi dan pelatihan program baru seperti program desa pintar ini dilaksanakan di *meunasah*. Demikian sebagai *community center*, maka *meunasah* berfungsi sebagai tempat untuk berkumpulnya masyarakat Gampong untuk mendiskusikan segala persoalan yang berkaitan dengan program tersebut, dan sebagai *government center*. Artinya semua keputusan politik yang memengaruhi sosial budaya masyarakat Gampong dilaksanakan di *meunasah*. Van Vallenhoven (Wignjodipuro, 1979) menegaskan bahwa *meunasah* adalah pusat pemerintahan Gampong yang merupakan pusat pengambilan semua keputusan oleh elit Gampong Aceh. *Meunasah* sangat terikat dengan kehidupan Gampong, karena Gampong sendiri merupakan unit persekutuan masyarakat hukum yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui hukum, menyelidiki sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum, dimana dalam kehidupan sehari-hari orang-orang dikuasai oleh hukum.

Meunasah dapat dijadikan pijakan dan kekuatan dalam pengembangan masyarakat Aceh ke depan untuk menghasilkan masyarakat Aceh yang memiliki kemampuan unggul dan cerdas secara intelektual dan profesional, namun sekaligus memiliki karakter nilai-nilai Aceh yang kuat. Meunasah dapat pula menjadi simbol demokrasi, dapat dijadikan sebagai kekuatan dengan membangun secara sistematis. *Meunasah* sebagai simpul-simpul kekuatan masyarakat yang dapat dengan mudah untuk melakukan kontrol sosial-budaya, politik, dan keagamaan. Sekaligus pemerintah dapat menggunakan meunasah untuk mensosialisasikan beragam rencana pembangunan yang dilakukan di masa mendatang.

Sebagai salah satu bentuk kearifan lokal Aceh, Gampong menjadi strategi bagi upaya pengembangan dan penguatan masyarakat di Indonesia. Yang harus dilakukan adalah menerapkan kearifan lokal yang ada di Gampong Aceh menjadi kekuatan proses politik di Aceh dengan segala perangkat dan struktur politik dapat menjadi alternatif bagi pengembangan masyarakat. Hal tersebut penting agar kearifan lo-

kal Aceh mengenai sistem dan struktur pemerintah Gampong tetap berlangsung dan menjadi kekuatan dalam pengembangan dan konstruksi masyarakat Aceh.

Dalam pelaksanaan pemerintah Gampong, perangkat Gampong menggunakan fasilitas yang terdapat di desa tersebut, yang salah satu yang sangat vital adalah meunasah selalu terletak di Gampong-Gampong atau desa-desa. Menurut Badruzzaman (2007) bahwa fungsi meunasah menjadi sentral pembangunan masyarakat Gampong yang mempertemukan segala proses dan hubungan sosial di antara masyarakat Gampong, masyarakat Gampong dengan Gampong lainnya dan masyarakat elit/masyarakat Gampong dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam sistem pemerintahan Aceh.

Program desa pintar, dengan kata lain *meunasah* merupakan lembaga yang terdapat dalam sistem masyarakat Aceh yang memiliki peran yang sangat kuat dan mengakar dalam pembentukan masyarakat Aceh. *Meunasah* adalah kekuatan masyarakat Aceh, entitas masyarakat yang jika hilang akan menghilangkan identitas masyarakat Aceh. Oleh karena itu, kontribusi meunasah terhadap peradaban Aceh sangat besar, atau dapat kita katakan bahwa meunasah adalah peradaban masyarakat itu sendiri, tanpa *meunasah*, maka masyarakat Aceh akan kehilangan karakter orang Aceh yang selama ini menjadi kekuatan bagi Aceh. Artinya level pertama pengembangan masyarakat Aceh adalah Gampong. Dalam Gampong terdapat *meunasah* sebagai wadah pengembangan masyarakat.

Internet masuk desa/Gampong sedikit banyaknya mengubah pola komunikasi dan hubungan dalam sistem pemerintahan Gampong. *Keuchiek* selama ini sebagai pusat informasi (*center of information*) dalam masalah pemerintahan, didukung oleh *Imuen meunasah* sebagai pusat pengetahuan keagamaan saat ini tidak lagi menjadi satu-satu sumber informasi melainkan muncul sumber-sumber informasi lainnya yang dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat Gampong. Selama beberapa abad pada masa kerajaan Aceh dan pasca kemerdekaan *Keuchik* adalah Kepala Badan Eksekutif Gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong (Qanun, 2003). *Keuchiek* dan perangkat desa lainnya menjadi sumber informasi dan kebijakan tingkat Gampong. Sedangkan, semenjak masuk internet dan perkembangan teknologi komunikasi yang memunculkan beragam media baru dan sosial media yang digunakan dan diakses sebagai sumber informasi oleh masyarakat, maka masyarakat saat ini mempunyai

sumber informasi alternatif yang mungkin saja lebih dipercaya dibandingkan aparat pemerintahan Gampong.

Proses politik desa tidak mengalami perubahan dalam struktur pemerintahan. Struktur pemerintahan Gampong Aceh masih tetap sama sesuai Qanun (2003). Namun, proses politik dan hubungan politik mengalami pergeseran yang signifikan. Perubahan atau pergeseran ini realistis terjadi dalam sebuah masyarakat yang menerima ide-ide baru. Dan tidak dapat dihindari bahwa terkadang muncul konflik internal antara sesama elit politik dan masyarakat, ataupun konflik eksternal antara elit dan masyarakat Gampong dengan masyarakat Gampong lainnya atau aparat yang lebih tinggi.

Konflik yang muncul di tengah masyarakat Gampong yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi komunikasi/internet dan munculnya *new media* dan *social media* lebih karena ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi kompleksitas persoalan karena teknologi baru. Disamping itu konflik muncul karena ‘semangat’ masyarakat dalam memanfaatkan teknologi internet tersebut dalam banyak sektor kehidupan baik ekonomi, sosial, budaya, keagamaan, dan politik.

Perubahan yang terjadi dalam sistem politik Gampong adalah lebih menitik beratkan pada proses dan hubungan politik bukan pada konsep dan sistem politik. Perubahan dalam proses politik misalnya, metode berkomunikasi dalam proses transformasi pesan politik antara sesama aparat pemerintahan Gampong, elit politik, dan masyarakat, yaitu (1) Kualitas komunikasi lebih sering dan cepat, walau tidak selalu berarti lebih baik/ bermakna, (2) Sumber informasi bertambah dan mudah diperoleh sehingga memberikan pengetahuan baru mengenai kegiatan/program yang dilakukan oleh masyarakat, (3) Jenis pesan lebih beragam dan kemasan alternatif, (4) Hubungan kekerabatan cenderung berkurang karena tergantikan dengan internet, (5) Proses penyelesaian masalah atau persoalan Gampong lebih cepat dan tidak harus selalu dirapatkan di Meunasah atau *face to face communication* diantara para pihak, (6) Masyarakat mempunyai alternatif informasi dan elit politik atau aparat Gampong buka lagi sumber satu-satunya informasi yang dapat diperoleh, (7) Konflik berkaitan perbedaan pendapat lebih mudah muncul, lebih terbuka dan terkadang menyebar luas secara cepat, (8) *Meunasah* bukan satu-satu wadah bagi penyelesaian masalah dengan rapat dan musyawarah, namun penyelesaian masalah dapat dilakukan secara virtual, (9) Masyarakat mempunyai

hiburan alternatif yang disediakan internet/*new media* dan *social media*, sehingga tradisi Gampong Aceh terkadang terabaikan dan mulai dilupakan, dan (10) Proses pendidikan anak-anak yang semua banyak peran ibu atau perempuan dengan zikir/dhalae Aceh seperti hikayat-hikayat Aceh, saat ini cenderung tergantikan dengan beragam konten internet/*new media* seperti kartun, nyanyian, film dan lain-lain atau *selfie*.

Terlepas dari beragam perubahan sosial, budaya, dan politik di tengah masyarakat Gampong karena perkembangan teknologi komunikasi-Internet, ternyata fungsi meunasah tersebut masih tetap ada, walau hal-hal baru diadopsi; mau tidak mau oleh elit Gampong dan masyarakat. *Meunasah* dan semua perangkat Gampong dalam sistem pemerintahan Gampong sudah selayaknya memelihara dengan serius kearifan loka Aceh walau generasi berganti. Esensi dari ideologi masyarakat Aceh tidak boleh tergantikan. Namun, proses dan kegiatannya dapat saja mengalami pergeseran sesuai dengan perkembangan zaman.

Internet ialah sistem komputer umum, yang berhubung secara global dan menggunakan TCP/IP sebagai protokol pertukaran paket (*packet switching communication protocol*). Rangkaian internet yang terbesar dinamakan Internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaedah ini dinamakan *internet working*. Internet merupakan jaringan komputer terkoneksi secara global yang berkomunikasi secara bebas serta berbagi dan bertukar informasi (Baran, 2012).

Internet menjadi kekuatan dalam perubahan masyarakat di berbagai belahan dunia. Internet memperkuat pemberdayaan masyarakat desa. Kesenjangan digital akan segera berakhir. Ketersediaan layanan internet membuka perubahan di banyak bidang, seperti pendidikan, ekonomi, politik bahkan sosial budaya, dan agama. Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berkembang ke arah yang lebih baik dengan peluang yang besar untuk meningkatkan kualitas hidup personal, kelompok, masyarakat, dan negara. Masyarakat desa yang selama ini sulit terjangkau dengan jaringan internet dan telpon terutama bagi masyarakat desa terluar dan terbatas Indonesia. Masyarakat desa yang tertinggal jauh dari pembangunan dan pengembangan masyarakat terutama disebabkan oleh pembangunan jaringan internet yang tidak ada atau belum memadai. Sehingga membuat desa dan masyarakatnya tertinggal dalam berbagai bidang kehidupan.

Komunikasi Politik Masyarakat Aceh dengan menggunakan pendekatan metode *field research*, kekayaan sosial budaya atau budaya lokal. Dalam proses komunikasi politik penelitian juga memfokuskan pada peran politik dan sosial budaya seperti perangkat budaya dan adat istiadat dalam pemerintahan Gampong Aceh, menelaah peran dan fungsi meunasah sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan sosial budaya serta komunitas Aceh.

Penelitian ini juga memfokuskan dengan isu-isu terbaru yang berkembang dan diterapkan dalam Gampong Aceh yaitu program Kominfo Desa pintar. Program Desa Pintar adalah program untuk meningkatkan pelayanan jaringan sosial ketahanan dilakukan sebagai upaya memahami dan mengungkapkan proses interaksi komunikasi khususnya yang berkaitan dengan pola komunikasi dan jaringan ketahanan sosial dalam masyarakat desa (Gampong) di Aceh yang menggunakan meunasah sebagai wadah untuk menempa masyarakat Aceh. Meunasah sebagai *social and community center* masyarakat Aceh. Melalui *meunasah*-lah orang Aceh di Gampong belajar mengenai nilai-nilai hidup, memelihara ketahanan sosial budaya, politik, agama bahkan ekonomi mereka. *Meunasah* adalah entitas peradaban masyarakat aceh dan peradaban Aceh dibangun melalui *meunasah*.

Seluruh pengembangan masyarakat desa diawali dari meunasah. Meunasah sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, pusat komunitas, sekaligus sebagai tempat ibadah bagi orang Aceh. Seluruh administrasi desa atau Gampong diputuskan di meunasah. Dalam bidang pendidikan misalnya, anak-anak Aceh menerima pendidikan pertama di *meunasah* dengan belajar mengaji, membangun karakter dan sosial budaya lainnya. Gampong selalu mempunyai meunasah sebagai pusat semua aktivitas masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Berbagai masalah dan perencanaan hidup masyarakat dilakukan atau diputuskan di meunasah. Hampir tidak ada orang Aceh yang lepas dari keberadaan *meunasah* sebagai pusat pembentukan peradaban masyarakat Aceh.

Kesimpulan

Sistem komunikasi politik pada pemerintahan Aceh tidak berubah walaupun adanya internet masuk desa/gampong melalui program 'desa pintar'. Pemerintahan Aceh tetap menggunakan sistem dan struktur pemerintahan gampong sebagaimana yang termaktum dalam peraturan Qanun (2003) Tentang Pemerintahan Gampong. Internet sebagai bagian perkembangan teknologi komunikasi tidak bisa

terbantahkan ikut menyebabkan perubahan sosial budaya dan politik di tengah masyarakat gampong sebagai bagian dari proses adaptasi masyarakat yang tidak mungkin menolak teknologi baru dan implikasi dari hadirnya teknologi baru seperti *new media* dan *social media*. Perubahan yang terjadi dalam pemerintahan gampong terutama berkaitan dengan proses pelaksanaan pemerintahan sehari-hari, yang sebelumnya menggunakan media *face to face communication* dalam bentuk pertemuan di *meunasah* sebagai *community* dan *government center* masyarakat gampong, setelah adanya internet proses politik dibantu dengan memanfaatkan internet. Aparat pemerintahan gampong seperti *keuchiek*, *imuem meunasah* dan *tuha puet* selama ini sebagai sumber informasi utama bergeser posisinya peran internet sebagai sumber informasi alternative bagi masyarakat. Dalam bidang sosial budaya perubahan dalam membangun kekerabatan yang mana masyarakat sudah mulai terbiasa berinteraksi melalui jaringan internet (*new media* dan *social media*), dan dalam bidang ekonomi, masyarakat mulai menggunakan internet dalam pengembangan ekonomi seperti promosi dan *e-commerce*. Namun bagaimanapun, aparat gampong tetap mempunyai kontrol, mengawasi proses pengembangan internet masuk desa sebagai bentuk tanggung jawab sebagai 'penjaga nilai-nilai sosial budaya/reusam Aceh.

Referensi

- , Arifin. (2003). *Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Baran, Stanley J. (2012). *Mass Communication Theory; Foundations, Ferment, and Future*. Belmont, CA : Thomson.
- Bennett, W. L., & Shanto Iyengar. (2008). A New Era of Minimal Effects? The Changing Foundations of Political Communication. *Journal of Communication*. Vol. 58. pp. 707-731.
- Christen, C. T., & Gunther, A. C. (2003). The influence of mass media and other culprits on the projection of personal opinion. *Communication Research*. Vol. 30, pp. 414-431.
- Dahlgren, P. (2001). The public sphere and the net: Structure, space and communication. In W. L. Bennett & R. M. Entman (Eds.), *Mediated politics: Communication in the future of democracy* (pp. 33-55). Cambridge, UK: Cambridge University Press.

- Delli Carpini, M. X. (2000). In search of the informed citizen: What Americans know about politics and why it matters. *Communication Review* Vol. 4, pp. 129-164.
- Entman, R. M., & Herbst, S. (2001). Reframing public opinion as we have known it. In W. L. Bennett & R. M. Entman (Eds.), *Mediated politics: Communication in the future of democracy* (pp. 203–225). Cambridge UK: Cambridge University Press.
- Graber, Doris A. (2005). Political Communication Faces the 21st Century. *Journal of Communication*. pp. 479-507.
- Groat, L. and Wang. (2002). *Architectural Research Methods*. New York: John Wiley & Sons.
- Guba and Lincoln. (1994) *Handbooks of Qualitative Research*, Sage Publication, London.
- Habermas, Jurgen. (2006). Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Enjoy an Epistemic Dimension? *The Impact of Normative Theory on Empirical Research Communication Theory*. Vol. 6, pp. 411-426.
- Kurniawan. Andri. (2012). Tugas dan Fungsi Kechiek dan Tuha Peut Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Banda Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 10 No. 3.
- Livingstone, Sonia. (1999). New media, new audiences? *New media and Society*, Vol.1, No 1, pp. 59-66
- McQuail, Denis. (2010). *Teori Komunikasi Massa*. Edisi 6. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Mosco, V., & Foster, D. (2001). Cyberspace and the end of politics. *Journal of Communication Inquiry*. Vol. 25, pp. 218–236.
- Nimmo, Dan (2004). *Komunikasi Politik*. Bandung: Rosdakarya.
- Rahn, W. M., & Rudolph, T. J. (2001). National identities and the future of democracy. In W. L. Bennett & R. M. Entman (Eds.), *Mediated politics: Communication in the future of democracy*. (pp. 453–467) Cambridge UK: Cambridge University Press.
- Shah, Dhavan V., Nojin Kwak, and R. Lance Holbert. (2001). “Connecting” and “disconnecting” with civic life: Patterns of Internet use and the production of social capital. *Political Communication*. Vol. 18, pp. 141–162.
- Sparks C. (2001). The Internet and the global sphere. In W. L. Bennett & R. M. Entman (Eds.), *Mediated politics: Communication in the future of democracy* (pp. 75–95). Cambridge UK: Cambridge University Press.
- Stanley, Phiona. (2013). *A Critical Ethnography of ‘Westerners’ Teaching English in China*. New York: Routledge.
- Sunstein, C. (2001). *Republic.com*. Princeton NJ: Princeton University Press.
- Wahid, Umaimah. (2012). *Komunikasi Politik, Perkembangan Teori dan Praktek*. Bekasi: Widya Media Komunikasi.
- Wignjodipuro, Surojo (1979). *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*. Bandung: Penerbit Alumni.

